



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 377 /A-01/ XI /TAHUN 2024

TENTANG  
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, maka perlu menetapkan Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pemerintahan Daerah; Pengawasan Penyelenggaraan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati.
- KELIMA : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah yang belum tercantum dalam Keputusan Bupati ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan untuk mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan program strategis Nasional atau Daerah dan melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 4 November 2024

Pjs BUPATI LUWU TIMUR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 377 /A-01/ XI /TAHUN 2024  
 TENTANG  
 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA  
 SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
 KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN PEMERINTAH	PROGRAM	KEGIATAN	POTENSI (OBJEK YANG DIKERJASAKAN)	KELUARAN/ OUTPUT	HASIL/ OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN	JENIS KERJA SAMA DAERAH	DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretariat Daerah	Pendidikan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Pengembangan, Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	1. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop dan bimbingan teknis 2. pengembangan kompetensi sumber daya manusi 3. pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka	terselenggara nya Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidkan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya masyarakat	2025-2030	KSDPK	fasilitas perkuliahaan, tenaga pengajar/dose, penelitian dosen, bimbingan intensif karya ilmiah dan mahasiswa kuliah kerja nyata
2	Sekretariat Daerah	Sosial	Program Pemerintahan dan	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	1. kerja sama program terkait perlindungan dan	1. sinergi kerjasama dalam bidang	2025	KSDPK	pendampingan dari tim Sulawesi

			Kesejahteraan Rakyat		di Kabupaten Luwu Timur	kesejahteraan perempuan dan anak di sektor kakao, 2. integrasi program atau sharing sumber daya yang dimiliki, 3. dukungan kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan dan perluasan (reflikasi) program 4. pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di 20 Desa binaan	perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak 2. terpromosikan hak-hak anak, tercergah dan teresepunya segala bentuk kekerasan anak serta pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan			Community Foundation (SCF)
3	Sekretariat DPRD	Pendidikan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan kapasitas dewan	pemahaman anggota dewan terhadap regulasi	meningkatnya sumber daya manusia (anggota dprd)	2025	KSDPK, Sinergi	Pemateri, Narasumber dari pUSAT
4	Badan Pendapatan Daerah	Lingkungan hidup	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terciptanya hubungan kerjasama yang baik terkait pengolahan limbah besi tua (Hibah Scrap) PT.Vale	Adanya transparansi laporan hasil penjualan besi tua (Hibah Scrap) PT.Vale	Meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya pada lain-lain pendapatan daerah yang sah	2025-2027	KSDPK	1.Rapat/ pertemuan dengan PT.Vale.  2. Monitoring lapangan ke lokasi scrap PT.Vale
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan	Pertanian	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian Pengembangan	Kajian pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertambangan	Jumlah Kajian Pertumbuhan Ekonomi di Luar	Pertumbuhan PDRB meningkat di	2025-2029	KSDPK	Sarana dan Parasara pertanian

	Pembangunan Daerah			Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Sektor Pertambangan sebanyak 1 Kajian per Tahun	luar sektor Tambang			secara umum
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sosial	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi pengelolaan kas Daerah	<p>1. Peningkatan layanan keuangan: kerjasama dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat</p> <p>2. Kolaborasi antara pengelolaan aset daerah termasuk penyusunan strategi investasi yang optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah</p>	<p>1. Meningkatkan pendapatan daerah</p> <p>2. Akses keuangan yang lebih baik</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas layanan keuangan: masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik dan cepat terhadap layanan perbankan.</p> <p>2. Menjaga kerahasiaan</p> <p>3. Menstabilkan sistem keuangan</p>	2025-2026	KSDPK	Bank daerah dapat menyediakan layanan perbankan yang memadai bagi BKAD seperti rekening dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Assesment Center	Uji Potensi & Kompetensi Metode Assesment Center.	Terciptanya ASN yang memiliki Potensi dan Kompetensi sesuai dengan Tupoksinya	1. Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif menjadi 83% pada tahun 2026 (IKU, RPD 2024-2028, DP3AP2KB)	2025-2028	KSDPK, Sinergi	Penyediaan Lokasi dan Fasilitas serta sertifikat
8	Badan Kepegawaian	Pendidikan	Pelayanan Kepegawaian	Pengelolaan Assesment	Seleksi Terbuka JPT, JOBFIT	Terciptanya ASN yang memiliki	1. Persentase kelembagaan	2025-2028	KSDPK, Sinergi	Penyediaan Ilmu

	Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Center		Potensi dan Kompetensi sesuai dengan Tupoksinya	Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif menjadi 83% pada tahun 2026 (IKU, RPD 2024-2028, DP3AP2KB)			Pengetahuan dan Fasilitas
9	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Assesment Center	Uji Potensi & Kompetensi Metode Assesment Center	Terciptanya ASN yang memiliki Potensi dan Kompetensi sesuai dengan Tupoksinya	1. Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif menjadi 83% pada tahun 2026 (IKU, RPD 2024-2028, DP3AP2KB)	2025-2028	KSDPK, Sinergi	Hasil Penilaian sebagai Informasi tentang kader-kader potensial (talent pool) dalam hasil uji Potensial & Kompetensi Metode Assesment Center
10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bimtek	Pelaksanaan Bimtek Manajemen kepegawaian	Meningkatkan Kompetensi para Pegawai dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif menjadi 83% pada tahun 2026 (IKU, RPD 2024-2028, DP3AP2KB)	2025-2028	KSDPK, Sinergi	Penyediaan Lokasi dan Fasilitas serta sertifikat
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Kerjasama Penanganan Sungai Bungadidi dan Sungai Kalaena Bencana untuk mengurangi	Terlaksananya penanganan banjir Sungai Bunga Didi dan Sungai Kalaena	Menurunnya potensi banjir akibat luapan Sungai Bungadidi	2025-2029	Sinergi	(1). Penanganan Sungai Bungdidi dan Sungai

				Bencana	potensi banjir		dan Sungai Kalaena, kerugian ekonomi, dan meminimalisir korban bencana			Kalaena
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama Penanganan kerusakan Jalan akibat longsor untuk mengurangi risiko bencana	Terlaksananya penanganan longsor di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana	Menurunnya potensi longsor, kerusakan jalan dan akses Trans Sulawesi menjadi lancar	2025-2029	Sinergi	Penanganan/ Perbaikan Jalan Trans Sulawesi
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemasaran Produk UMKM melalui kemitraan dengan ritel	Memfasilitasi usaha mikro untuk memasarkan produknya melalui ritel	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	2025	KSDPK	menyediakan tempat untuk menyimpan produk UMKM
14	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Penyelamatan dan Evakuasi	Melakukan Kerjasama dengan BKSDA tentang penyelamatan hewan yang ditangkap oleh	1. Penyelamatan Binatang dari kepunahan 2. Penyelamatan Lingkungan dari	satwa liar yang evakuasi oleh tim damkar bisa	2025-2026	Sinergi	1. Peralatan yg dibutuhkan dalam mengevakuasi satwa liar

			Non Kebakaran		Tim Rescue Damkar	satwa liar	dikembalikan ke habitatnya			2. Tempat Sementara satwa liar sebelum diserahkan ke BKSDA
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	PT.VALE tentang kerjasama Pelatihan Personil Damkar	Agar Personil Damkar mempunyai kemampuan dan keterampilan supaya dapat melaksanakan tugas dengan profesional	1. Mempunyai sertifikat keahlian 2. personil damkar yang sudah terlatih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik	2025-2026	KSDPK	1. Anggaran yang cukup untuk Diklat dari OPD/Pemda
16	Dinas Kesehatan	Kesehatan	pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	MoU dengan PT.MHA untuk Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 Medis Farmasi	Terselenggaranya Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 Medis Farmasi yang kadaluarsa	Terangkut dan termusnahkan Limbah B3 Medis Farmasi yang kadaluarsa	2025		1. Data kependudukan masyarakat Luwu Timur 2. Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur. 3. Anggaran Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Luwu Timur

										4. Sarana Prasarana Tingkat Pertama dan Lanjutan Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 5. Regulasi-regulasi tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
17	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kab/kota	Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi	1. Terbangunnya permukiman transmigran 2. di fasilitasinya Perpindahan dan Penempatan transmigran 3.pengurusan hak atas tanah, termasuk inventarisasi kepemilikan lahan dan fasilitasi pengurusan sertifikasi lahan 4. bimbingan adaptasi lingkungan, dan 5. terfasilitasinya pelayanan bantuan catu pangan.	Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi	2025-2020	KSDD	Bimbingan dan pendampingan dari kelompok usaha, misal pertanian

18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Swasta Tentang Pencatatan Kelahiran Secara Online Apabila ada masyarakat Kabupaten Banjar yang melahirkan pada Rumah Sakit Tersebut	Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Pembaharuan Kartu Keluarga meningkat	1. Presentase Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, Akta Kelahiran dan KIA) meningkat menjadi 90% ; 2. Mempermudah Pelayanan Kependudukan tanpa harus datang ke Disdukcapil.	2025-2026	KSDD, KSDPK	1. SDM khusus dari masing-masing RSUD 2. Pembuatan aplikasi adminduk 3. Sarana penunjang berupa.... 4. Dukungan APBD untuk membangun aplikasi adminduk sebesar Rp 100.000.000
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	perlu dilakukan kerjasama dengan Pihak BBKSDA Sulawesi Selatan sebagai pengelola 3 danau yang ada di kab. Luwu Timur sehingga Pemerintah Daerah bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di kawasan 3 danau tersebut.	dengan adanya kerjasama ini bisa memberikan dampak seperti pembangunan infrastruktur kepariwisataan dan pembangunan fasilitas pariwisata.	adapun outcome dari PKS antara Pemda dan BBKSDA adalah adanya income berupa tarif retribusi yang bisa menjadi pendapatan asli daerah bidang pariwisata dan juga pengelolaan taman wisata alam 3 danau bisa lebih	2025-2030	Sinergi	anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata.

							optimal dengan tetap mengedapank an prinsip pembangunan berkelanjutan.			
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman modal	Pengembangan iklim Investasi	Penetapan pemberian fasilitas/ins entif dan kemudahan penanaman modal	Pembentukan forum kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pelaku UMKM dan Toko Retail Modern	Berdirinya forum kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pelaku UMKM dan Toko Retail Modern	Meningkatkan volume penjualan dan kesejahteraan pelaku UMKM	2025	KSDPK	1. Fasilitas PIRT, Sertifikat Halal  2. Surat Edaran Kepala Daerah untuk membeli produk kelompok usaha bersama

